

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia dengan pihak Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dari Jepang dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia serta merebut senjata, karena pada saat Soekarno-Hatta membacakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia Jepang tidak mengetahuinya. Dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Jepang, di Jakarta para pemuda merencanakan untuk mengerahkan massa pada suatu rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta, agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara dihadapan Jepang, pada prinsipnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta setuju. Tetapi yang jadi permasalahan adalah sikap pihak Jepang bagaimana setelah menyerah dan menjadi alat Serikat. Apakah Jepang memusuhi Indonesia atau tidak, seandainya Jepang memusuhi Indonesia, pasti akan terjadi kekacauan yang hebat menimpa bangsa Indonesia (Poesponegoro, 1993: 101).

Pemerintahan Republik yang pada waktu itu baru berdiri dan merintis kebijakan-kebijakan politiknya, mendapatkan masalah baru lagi dengan kedatangan pasukan Serikat, hal ini menyebabkan keadaan sosial politik bangsa Indonesia tidak stabil ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan Sekutu yang makin memperburuk keadaan Republik Indonesia. Dengan kedatangan pasukan Sekutu ke Republik Indonesia pasca kemerdekaan, menjadikan bangsa ini memerlukan sosok pemersatu bangsa yang tujuannya, untuk menyatukan kembali seluruh elemen masyarakat agar melakukan revolusi nasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Sosok tersebut adalah Soekarno-Hatta yang dalam revolusi Indonesia pengaruhnya sangatlah besar, karena hanya merekalah yang mampu menanganinya. Jadi, pada hakikatnya revolusi di Indonesia tidak

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat dilepaskan dari sosok Soekarno, yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia sekaligus tokoh revolusioner Indonesia. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang sangat tinggi dalam suatu Negara sehingga yang lainnya dapat dikatakan hanya sebagai alat seperti, para pamong desa, camat dan wedana bahkan Negara juga sebagai alat revolusi. Hal ini senada dengan pendapat Sukarno (1964) dalam amanatnya di Istana Negara yang mengungkapkan bahwa,

Rakyat adalah orang yang menduduki tempat yang tertinggi, tetapi yang lainnya hanya alat, alat dan alat. Negara juga adalah alat alat untuk revolusi dan revolusi merupakan alat juga yaitu alat untuk rakyat (Dokumen, 1964).

Selain melakukan seruan revolusi terhadap bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari pihak asing. Pada tahun 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan ekonomi yang salah satunya adalah *India Rice*, kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan alasan untuk mempertahankan hidup rakyat Indonesia dan berusaha bertahan dari kebijakan (blokade ekonomi) yang dijalankan Belanda pada saat itu. Indonesia menjual beras ke India dengan harga murah dengan harapan adanya timbal balik yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia yaitu India mengakui di dunia internasional tentang perjuangan bangsa Indonesia. Sesuai apa yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia, India pun akhirnya mengeluarkan kebijakannya yang mengakui perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional serta mengirimkan pakaian ke Indonesia. Menurut Sudiyo (2002: 113) untuk menghadapi kebijakan Pemerintah Belanda, pemerintah RI mencoba menarik perhatian dunia dengan cara memberikan bantuan beras kepada India dan juga menjamin modal asing (investasi) yang ditanamkan di Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan, justru kebijakan tersebut menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat di daerah-daerah pelosok Indonesia yang umumnya dikenal dengan

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

sebutan gerakan rakyat atau revolusi sosial. Walaupun, sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan buat melakukan revolusi sosial, karena setelah kemerdekaan perlawanan-perlawanan yang terjadi di daerah diakibatkan oleh persaingan elite-elite lokal. Sebagai contoh, perlawanan di daerah Pekalongan dan Brebes. Dalam tuntutanannya, tatanan pemerintahan harus diubah dengan tatanan pemerintahan yang baru, karena pemerintahan yang lama itu sudah tidak dapat mengurus rakyatnya. “Terjadi perlawanan rakyat bertujuan untuk menghapuskan tatanan lama seperti halnya kepala-kepala daerah, pamong desa, camat dan wedana serta pemerintah kabupaten” (Lucas, 1989: 141). Dalam memahami dinamika revolusi sosial yang harus diketahui yaitu bagaimana permulannya, siapa pemimpinnya, apa yang terjadi sehingga adanya perlawanan dari masyarakat, siapa penggantinya dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru.

Gejolak revolusi sosial di daerah-daerah pedesaan bukan untuk mempertentangkan sistem kelas-kelas sosial, melainkan kebanyakan revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan antar elite-elite lokal, kelompok-kelompok kesukuan atau kemasyarakatan dan antar generasi. Hal ini senada dengan pendapat Ricklefs (2008: 440)

Pada bulan November dan Desember 1945 revolusi di wilayah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lajim dikenal revolusi sosial. Akan tetapi istilah ini agak menyesatkan jika dianggap istilah untuk pertentangan kelas, karena kelas sosial yang rendah jarang menumbangkan kelas sosial yang dominan. Kebanyakan revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan elite-elite alternatif, kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antar generasi, serta kebanyakan revolusi sosial ini hanya sementara waktu tidak bertahan lama.

Pada tahun 1947 menjadi penting karena konflik di Indonesia semakin meluas dengan tuntutan yang sama, yaitu ingin mengubah tatanan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru, seperti yang pernah terjadi di daerah Brebes, Pemalang dan Tegal pada tahun 1945. Dalam masyarakat Jawa protes sosial itu sudah menjadi hal yang biasa pada awal mula berdirinya

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Pemerintah Republik. Di Keresidenan Pekalongan, lenggaong yang merupakan bagian penting dari tradisi ini mempunyai banyak tokoh "bandit" terkenal. Seperti halnya priayi, lenggaongpun berusaha mendapatkan kekuatan spiritual. Para lenggaong itu, percaya pada seorang guru yang sering kali menjadi ketua persaudaraan perguruan silat. Para lenggaong meyakini bahwa seseorang yang dianggap guru oleh dirinya adalah merupakan sumber ilmu (kanuragan/ngelmu"rahasia"), sehingga tidak serang lenggaong pun yang memberi tahukan siapa nama gurunya (Lucas, 2004: 191).

Di daerah Jawa Barat juga ada peristiwa yang sama, salah satunya yaitu Gerakan Protes Haji Sarip di Kabupaten Majalengka pada tahun 1947. Haji Sarip dalam protesnya mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan kehidupan. Ajakan Haji Sarip disambut baik oleh masyarakat setempat awalnya, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi hidup atau pelaku sejarah yaitu H. Kusnan (83 Tahun) beliau merupakan tetangga dari Haji Sarip pada waktu itu di Blok Jum'at. Beliau juga mengungkapkan bahwa Haji Sarip, datang dari Purwekerto awalnya masyarakat Desa Brujulwetan menerimanya karena Haji Sarip membuat organisasi (Barisan Banteng) yang dinilai oleh masyarakat pada saat itu adalah merupakan sebuah alat revolusi untuk melawan Belanda, akan tetapi sebaliknya Haji Sarip membuat organisasi (Barisan Banteng) tujuannya untuk melawan Pemerintah Republik dan pamong desa. Dalam gerakan protesnya Haji Sarip mempropaganda masyarakat dengan alasan pemerintah tidak fokus terhadap kehidupan masyarakat dan bangsanya melainkan sibuk dengan urusan lain,

Pemerintah poen tidak adil dan tidak bisa mengoeroes rakjat, boektinja jang njata pengiriman beras ke India sehingga rakjat India coekoeop dan rakjat terlantar semoea makanya rakjat berontak (ANRI, 1947. No. 57/R).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi permasalahan yang besar bagi masyarakat sekitar Kabupaten Majalengka. Hal ini terbukti jelas dalam protes yang dilakukan oleh Haji Sarip dan anggotanya yang disebabkan adanya

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

ketimpangan. Harapan masyarakat setelah kemerdekaan dapat memperbaiki hidup agar lebih baik atau makmur, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya, warga terlantar dan kelaparan pemerintah sibuk dengan urusan politiknya, selain itu juga harapan dari gerakan sosial ini adalah untuk menggantikan pemerintahan yang sudah ada dengan pemerintahan yang baru. Sehingga hal ini mengakibatkan gerakan protes di Kabupaten Majalengka dari tanggal 8 Mei sampai dengan 27 Juni 1947.

Sama halnya dengan revolusi sosial yang terjadi di Keresidenan Pekalongan yang menggunakan para lenggaong dalam gerakannya dan percaya dengan hal-hal mistis, di dalam gerakannya Haji Sarip membuat organisasi dan komplotan/organisasi yang dinamakan Barisan Banteng dan komplotan Gaib. Sosok Haji dianggap mempunyai kharismatik, pintar dan serba tahu, sehingga memudahkan untuk mempropaganda masyarakat yang dalam keadaan tertekan dengan kehidupan sosialnya, biasanya muncul gerakan *Millenarian* (Ratu Adil). Orang-orang yang percaya dan mengharapkan dapat selamat dari bencana dianjurkan supaya mematuhi petunjuk-petunjuk pemimpinnya dalam melakukan perlawanannya. (Kartodirdjo, 1984: 16).

Tetapi apabila melihat dari tahun gerakan protes Haji Sarip yaitu tahun 1947, itu mustahil pemerintah Republik Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan bangsa Indonesia, karena Indonesia baru merdeka kurang lebih 2 tahun, itu pun keadaan politik Indonesia masih kacau. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti Belanda pergi begitu saja meninggalkan Indonesia, justru tahun 1947 merupakan tahun yang berat bagi Indonesia. Selain harus mengusir Belanda dari tanah air, keadaan sosial, ekonomi dan politik Indonesia belum begitu stabil dengan ditandai masih banyaknya, gerjolak-gejolak yang terjadi di daerah-daerah baik itu protes terhadap Belanda atau protes terhadap Pemerintah Indonesia itu sendiri.

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Atas dasar penjelasan yang telah dipaparkan maka akan jadi suatu kajian yang menarik mengenai gerakan protes Haji Sarip di Kabupaten Majalengka terhadap pemerintah pada tahun 1947. Pertanyaan yang muncul adalah *Mengapa Haji Sarip melakukan protes terhadap pemerintah pada tahun 1947?* Merujuk pada hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan jawaban atas pertanyaan tersebut yang dituangkan dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Gerakan Protes Haji Sarip Terhadap Pemerintah Pada Tahun 1947 di Kabupaten Majalengka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun fokus permasalahan penelitian adalah “*Mengapa Haji Sarip melakukan protes terhadap pemerintah pada tahun 1947?*” Sementara untuk mengarahkan kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi Haji Sarip melakukan protes terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka pada tahun 1947?
2. Bagaimana upaya Haji Sarip menghimpun massa dalam melakukan gerakan protes terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka 1947?
3. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap gerakan protes Haji Sarip pada tahun 1947?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan latar belakang Haji Sarip melakukan protes terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka pada tahun 1947.

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

2. Mendeskripsikan gerakan protes Haji Sarip terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka.
3. Menjelaskan tindakan pemerintah terhadap gerakan protes Haji Sarip di Kabupaten Majalengka pada tahun 1947.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khasanah mengenai ilmu sejarah terutama sejarah sosial.
2. Memperkaya penulisan sejarah Indonesia pada masa revolusi.
3. Dalam dunia pendidikan yaitu, untuk memperkaya dalam pembelajaran sejarah

Kompetensi Inti : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar : Menganalisis peristiwa-peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa itu dan masa kini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Sejarah yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran rekonstruksi imajinatif mengenai peristiwa sejarah pada masa lampau secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah (Ismaun, 2005: 64). Terdapat empat tahap metode sejarah yakni sebagai berikut:

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a) *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Arsip Nasional di daerah Salemba Jakarta, Perpustakaan Universitas Padjajaran Jatinangor, Pusjarah TNI-AD, Disjarah TNI-AD dan Perpustakaan Batu Api di Jatinangor. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli buku-buku di Gramedia, Rumah Buku, Dewi Sartika dan Palasari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur berdasarkan buku yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis angkat dan sumber internet sebagai penunjang sumber yang didapat oleh penulis.

- b) *Kritik*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber Sejarah, baik isi maupun bentuknya (eksternal dan internal). Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi (*content*) dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan.
- c) *Interpretasi*, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain.

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini.

- d) *Historiografi*, merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah. Historiografi disebut juga penulisan sejarah. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan merupakan suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan ataupun catatan-catatan tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya. Pada akhirnya seorang sejarawan harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penelitian utuh yang disebut Historiografi (Sjamsuddin, 2007: 156).

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Penjelasan materi-materi tersebut adalah berupa informasi-informasi yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka ini dipaparkan beberapa konsep. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam bab ini adalah konsep-konsep yang relevan dengan bahan penulisan yang dilakukan yaitu “Gerakan Protes Haji Sarip Terhadap Pemerintah Pada Tahun 1947 di Kabupaten Majalengka”.

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Pada tahapan ini dimulai dari persiapan sampai langkah terakhir dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan terutama adalah metode historis. Penelitian historis (*historical research*) adalah suatu usaha untuk menggali fakta-fakta, dan menyusun kesimpulan dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian teknik penelitian yang penulis lakukan adalah dengan teknik studi literatur berdasarkan buku yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis angkat dan sumber internet sebagai penunjang sumber yang didapat oleh penulis.

Bab IV Gerakan Protes Haji Sarip Pada Tahun 1947 di Kabupaten Majalengka. Kemudian dengan uraian materi yang diantaranya mengenai latar belakang Haji Sarip melakukan perlawanan terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka pada tahun 1947. Kemudian proses gerakan protes Haji Sarip terhadap pemerintah di Kabupaten Majalengka. Dan materi terakhir mengenai sikap masyarakat dan tindakan Pemerintah terhadap perlawanan Haji Sarip di Kabupaten Majalengka.

Bab V Simpulan dan Saran. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan penulisan.

Tia Dwi Nurcahya, 2017

GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu